

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT MENGUNAKAN KONSEP DESENTRALISASI MELALUI OTONOMI DAERAH DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Suci Diana Sari^{1*}, Jorgian Farsi², Basir³, Noveni Delianti⁴

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

[1sucidiansari14@gmail.com](mailto:sucidiansari14@gmail.com), [2farsi.jorgian@gmail.com](mailto:farsi.jorgian@gmail.com), [3basirrrr29@gmail.com](mailto:basirrrr29@gmail.com), [4deliantinoveni@gmail.com](mailto:deliantinoveni@gmail.com)

(*: Corresponden Author)

Abstrak~ Desentralisasi merupakan salah satu bentuk perwujudan dalam pelimpahan kekuasaan pemerintah pusat kepada daerah dengan menggunakan asas otonomi. Desentralisasi ini sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dimana pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan atas dasar otonomi serta tugas pembantuan dengan menggunakan prinsip otonomi sebeb-as-besarnya di dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya dalam menghadapi segala permasalahan yang sedang dialami oleh pemerintah daerah, tidak perlu lagi menunggu instruksi dari pemerintah pusat karena tentu akan membutuhkan waktu dan proses penyelesaian masalah tidak tertangani dengan cepat. Tentunya dengan desentralisasi ini, pemerintahan lebih berjalan efektif sesuai dengan kondisi pada masing-masing daerah dan juga masyarakat dapat memajukan daerahnya sendiri.

Kata Kunci: Otonomi, Desentralisasi, Pemerintahan

Abstrack ~ Decentralization is one form of embodiment in the transfer of central government power to the region using the principle of autonomy. This decentralization has referred to Law No. 23 of 2014 where local governments can organize government on the basis of autonomy and assistance duties using the principle of free autonomy in the system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Of course, in the face of all the problems that are being experienced by the local government, there is no need to wait for instructions from the central government because of course it will take time and the process of solving problems is not handled quickly. Of course, with this decentralization, the government is more effective in accordance with the conditions in each region and also the community can advance its own area.

Keywords: Autonomy, Decentralization, Government

1. PENDAHULUAN

Kata otonomi diambil dari bahasa latin yaitu Auto dan Nomos. Auto berarti sendiri dan Nomos adalah aturan. Jika digabungkan maka akan menjadi sebuah arti yang mengatur diri sendiri. Jika diartikan dalam otonomi daerah maka akan berarti hak daerah dalam mengatur daerahnya sendiri. Desentralisasi dalam bahasa latin dibagi dalam beberapa bentuk seperti De yang berarti lepas dan Centrum yang berarti pusat, jika digabungkan maka akan berarti melepaskan diri dari pusat. Terminologi dari desentralisasi bisa juga berarti membagi, mendistribusikan yang bersifat administratif dari pemerintah pusat ataupun dari tempat yang tekonsentrasi. Dapat kita simpulkan bahwa desentralisasi merupakan proses pemindahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah.

Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan jika Asas Desentralisasi merupakan pelimpahan urusan pemerintahan dari pemerintah ataupun dari daerah tingkat atasnya kepada daerah seperti kabupaten, kota, provinsi dan sebagainya. Pada era sentralisasi, daerah-daerah yang jauh dari pusat kurang diperhatikan dan tentunya di setiap daerah memiliki beragam masalah di dalam sumber daya, maupun kapasitasnya. Sejak saat itulah munculnya sebuah otonomi daerah. Salah satu aspek desentralisasi yang berguna bagi kesejahteraan rakyat dan juga bidang perekonomian adalah desentralisasi fiskal. Akibat fungsi dari desentralisasi fiskal ini sudah diberikan oleh pemerintah pusat, maka segala keuangannya dilimpahkan kepada pemerintah daerah.

Dalam pembangunan ekonomi hal ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang 1945 dimana dalam mewujudkan kesejahteraan ini melalui

pembangun yang sudah direncanakan, dan juga dana yang berasal dari aliran APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) demi kebutuhan daerah otonom. Tentunya dalam pelaksanaan otonomi daerah harus memperhatikan partisipasi masyarakat, demokrasi, dan juga memperjatkan segala potensi dari daerah tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, Kepulauan Bangka Belitung yang akan menjadi objek penelitian. Kepulauan Bangka Belitung adalah Provinsi ke-31 yang dimekarkan setelah berada dibawah kewenangan Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2000. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menganalisa hasil dari penelitian yang sudah didapatkan dilapangan. Data primer dari penelitian ini menggunakan hasil observasi langsung dilapangan mengenai keadaan sebenarnya yang terjadi di Kepulauan Bangka Belitung dan data sekunder dari penelitian ini diambil dari sumber internal seperti dari Bank Indonesia, Bappeda dan juga beberapa buku maupun karya ilmiah yang sudah adad sebelumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

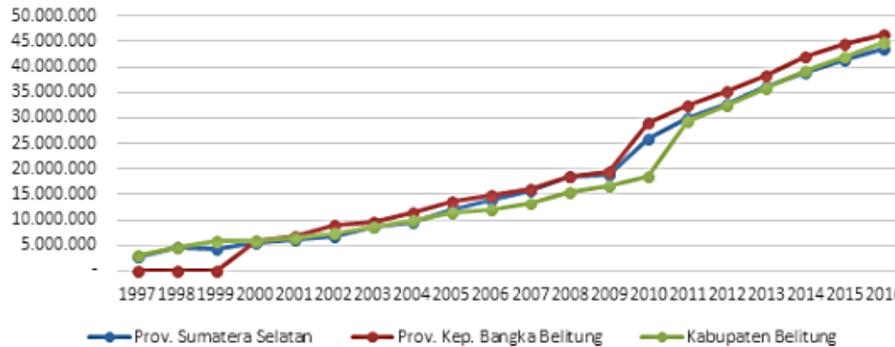
Tujuan dari desentralisasi ini yaitu meningkatkan akuntabilitas dalam proses penyediaan layanan dan memotong masalah yang melekat pada sistem sentralistik tradisional atau korupsi. Tentunya desentralisasi ini memiliki tujuan demokrasi sebagai instrument sebagai pendidikan politik dan tujuan berikutnya yaitu untuk kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik dengan efisien berdasarkan implementasi otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pelaksanaan otonomi pada daerah di seluruh Indonesia yang dibagi atas kabupaten dan kota masing-masing yang mempunyai pemerintahan daerah. Menurut Bahl dan Linh (1992) dan Gramlich (1993) mengatakan jika dengan dilimpahkannya kewenangan kepada pemerintah daerah, maka diharapkan sektor pelayanan masyarakat semakin efisien dan pada tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah provinsi ke-31 yang disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 dimana sebelumnya Kepulauan Bangka Belitung ini masih berada di bawah kewenangan Provinsi Sumatera Selatan. Setelah pemekaran terjadi terbentuklah beberapa wilayah seperti Kabupaten Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, dan juga Belitung Timur. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut hasil laporan perekonomian Bank Indonesia tahun 2022 tercatat sebagai provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan tumbuh sebesar 6,32% dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya meningkat 6,09%, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1 Indikator Makro Perkembangan Ekonomi Daerah. Bank Indonesia 2022



Jika dibandingkan dengan saat perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat berada dibawah kewenangan Provinsi Sumatera Selatan pasca desentralisasi, menunjukkan bahwa Bangka Belitung sejak terjadi pemekaran daerah terus melakukan peningkatan terutama dalam bidang kesehatan. Laju perbandingan setelah pemekaran wilayah dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



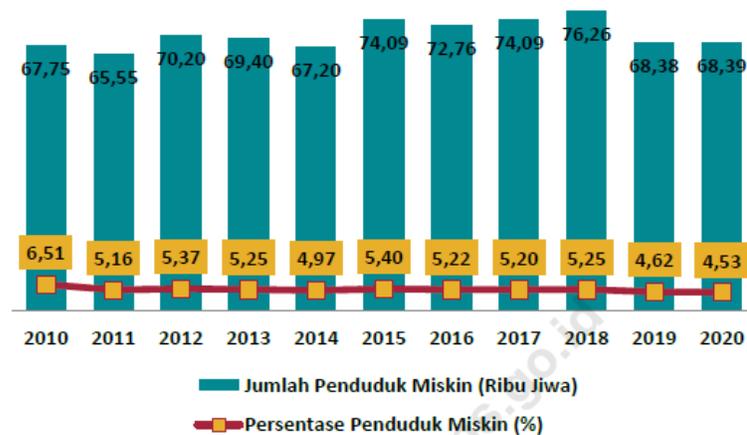
Gambar 2 Perbandingan PDRB Per Kapita Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung Setelah Pemekaran Wilayah. bappeda.belitung.go.id

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa setelah lepasnya Bangka Belitung dengan Sumatera Selatan, menunjukkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) di Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami peningkatan dan berada di atas PDRB Sumatera Selatan.

Menurut laporan perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Februari 2022, pada sektor pertambangan mengalami peningkatan dari 8,89% menjadi 16,16%. Di Kepulauan Bangka Belitung sendiri memiliki Sumber Daya Alam Timah terbesar di Indonesia dengan jumlah 90% dari produksi timah nasional. Semenjak terjadinya desentralisasi kebijakan dalam penambangan timah sudah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah kemudian mengizinkan semua elemen masyarakat untuk melakukan penambangan timah. Sebagai salah satu daerah penghasil timah terbesar di Indonesia, tentunya menjadi salah satu sumber pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung. Jika pada saat ini Kepulauan Bangka Belitung masih dipegang oleh Sumatera Selatan tentu segala bentuk perekonomian harus berdasarkan keputusan pemerintah pusat/yang lebih tinggi yaitu Sumatera Selatan, dan tentu tingkat kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung tidak sebesar sekarang.

Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa masalah atas kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terkait izin penambangan. Banyak sekali pertambangan timah ilegal yang menjamur di Kepulauan Bangka Belitung baik di darat maupun di lepas pantai/laut, dan juga lahan tambang yang telah selesai dipakai tidak dilakukan reklamasi serta pantai-pantai yang rusak akibat penambangan timah ilegal. Dalam hal ini, jika berkaitan dengan desentralisasi, seharusnya pemerintah daerah harus membawa daerahnya menuju lebih baik lagi. Tentunya jika dibiarkan masalah ini juga akan membawa kepada penurunan pendapatan di daerah Bangka Belitung mengingat salah satu sumber pendapat di daerah ini adalah melalui sektor wisata dan juga sektor pertambangan.

Tentunya dengan pelimpahan kekuasaan yang semula dipegang oleh Sumatera Selatan, membuat perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung menjadi mandiri dan semakin berkembang dari tahun ke tahun. Terbukti dari tingkat kemiskinan di Bangka Belitung sejak tahun 2010 hingga 2020 mengalami penurunan, grafik perkembangan penduduk miskin di Bangka Belitung dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: BPS, Susenas 2010-2020

Gambar 3 Perkembangan Penduduk Miskin, 2010-2020. BPS, Susenas 2010-2020

Hal ini menunjukkan semenjak adanya pelimpahan kekuasaan dari pemerintahan yang tinggi ke pemerintahan yang rendah membuat laju kesejahteraan ekonomi di Bangka Belitung semakin meningkat, terlebih pada tahun 2000 akhirnya Bangka Belitung berdiri dengan provinsi sendiri.

4. KESIMPULAN

Dengan adanya desentralisasi ini diharapkan banyak wilayah di seluruh Indonesia dapat mengalami peningkatan baik pada sektor ekonomi, kesehatan dan juga pariwisatanya. Pengaruh desentralisasi tentu akan membawa pengaruh positif bagi keuangan di daerah dibandingkan harus bergantung pada pemerintahan pusat atau pemerintahan yang lebih tinggi. Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu contoh penerapan desentralisasi yang berhasil setelah lepas dari Sumatera Selatan. Indek kesejahteraan di Bangka Belitung juga menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah tersebut tidak bertambah melainkan semakin menurun dari tahun ke tahun, hal ini juga diperkuat dengan aturan penambangan yang diberikan oleh pemerintah daerah bagi setiap orang yang ingin melakukan pertambangan timah namun dengan catatan untuk tetap menjaga dan melestarikan alam yang ada di Bangka Belitung ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akai, Nobuo, & Sakata, Masayo. (2002). Fiscal Decentralization Contributes To Economic Growth: Evidence From State-Level Cross-Section Data For The United States. *Journal Of Urban Economics* 52 (2002) 93–108
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2020). Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019/2020. Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik. ISSN: 2354-8045. Nomor Publikasi: 19550.2012. Katalog: 4102004.19
- Bahl, Roy W. and Johannes Linn. 1992. *Urban Public Finance in Developing Countries*. New York: Oxpord University Press.
- Bank Indonesia. (2022). *Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Mei 2022*. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Kepulauan-Bangka-Belitung-Februari-2022.aspx>, 24 Mei 2022
- Bappeda Kab. Belitung. (2019) *Kemandirian Fiskal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dan Kabupaten Belitung Pasca Desentralisasi*. <https://bappeda.belitung.go.id/kemandirian-fiskal-provinsi-kepulauan-bangka-belitung-dan-kabupaten-belitung-pasca-desentralisasi/>, 24 Mei 2022

- Bird, R., dan Vaillancourt, F. (1998). *Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Cambridge University Press, United Kingdom.
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Hirawan, Susiyanti. (2007). *Desentralisasi Fiskal Sebagai Suatu Upaya Meningkatkan Penyediaan Layanan Publik (Bagi Orang Miskin) di Indonesia*. Pidato pada Pengaugerahan Guru Besar di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 24 Februari 2007.
- Wulandari. 2001. Kemampuan Keuangan Daerah di Kota Jambi Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Kemampuan Keuangan Daerah* (Vol. 5, No. 2). November.